

**BAB III**

**PELAKSANAAN REKRUITMEN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018 OLEH PARTAI  
GERAKAN INDONESIA RAYA**

**A. Pelaksanaan Rekrutmen Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam  
Pemilihan Walikota Bengkulu Tahun 2018 Oleh Partai Gerindra**

Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat.<sup>1</sup>

Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu:<sup>2</sup>

- a. pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom;
- b. pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas;
- c. pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu;

---

<sup>1</sup> <http://ditjenpp.kemendikham.go.id/htn-dan-puu/507-peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis.html>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, pukul 23.00 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

- d. pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas; dan
- e. penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi.<sup>3</sup>

Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.<sup>4</sup>

Pada tahun 2018 ini hampir setiap daerah di Indonesia akan mengadakan pemilihan kepala daerah langsung secara serentak. Partai politik maupun gabungan partai politik tengah bersiap-siap untuk mengajukan calon kepala daerah dengan melakukan proses penjaringan calon kepala daerah.

Kedudukan kepala daerah, baik Gubernur, Bupati dan Walikota, membutuhkan kemampuan yang menunjukkan kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin pemerintahan dengan baik. Oleh karena itu, sebelum memasuki kompetisi dalam pemilihan kepala daerah, partai politik maupun gabungan partai

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

politik melakukan rekrutmen bakal calon sehingga tidak semua anggota partai ataupun masyarakat bisa menjadi calon kepala daerah.

Dalam melaksanakan rekrutmen bakal calon, partai politik memberlakukan sistem atau mekanisme yang berbeda-beda, sistem atau mekanisme tersebut adalah:<sup>5</sup>

1. Sistem pemilihan tertutup.

Sistem pemilihan tertutup adalah adalah sistem rekrutmen bakal calon yang dilakukan hanya oleh pengurus partai politik dengan variasi sistem. Istilah “variasi sistem” merujuk pada mekanisme penentuan akhir bakal calon yang akan mengikuti kompetisi pemilihan langsung atau yang akan menjadi calon. Partai-partai politik yang demokratis, dengan sistem kepemimpinan demokratis pula, umumnya menetapkan bahwa penentu akhir pencalonan adalah pengurus partai politik setempat. Sedangkan partai-partai politik konservatif, dengan sistem kepemimpinan yang bergantung pada figur, pencalonan akhir ditentukan oleh pengurus pusat.

2. Sistem Konvensi

Sistem rekrutmen calon yang sangat populer di negara-negara demokrasi adalah sistem konvensi. Sistem konvensi dilakukan dengan cara pemilihan pendahuluan terhadap bakal calon dari partai politik oleh pengurus dan atau anggota partai. Kelebihan sistem konvensi terletak pada pengembangan atau peningkatan popularitas bakal calon melalui proses kampanye internal dan pendidikan politik yang ditawarkan (debat publik, penyampaian visi dan misi, dan lain-lain). Sistem konvensi sangat efektif bagi partai kader, dan sebaliknya kurang efektif bagi partai massa.

Indonesia salah satu negara yang menggunakan sistem konvensi, hal ini dapat kita lihat dari bakal calon kepala daerah dan anggota legislatif mendaftarkan diri ke partai politik untuk mengikuti seleksi atau rekrutmen. Partai politik saat ini

---

<sup>5</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hal. 238.

sangat terbuka kepada semua bakal calon yang ingin mencalonkan diri melalui partai politik. Sebagai contoh banyaknya publik figure/ artis yang mecalonkan diri menjadi anggota legislatif ataupun calon kepala daerah.

Syarat pencalonan kepala daerah bertambah berat. Jika dalam aturan lama hanya mengisyaratkan Parpol atau gabungan Parpol minimal memiliki 15% kursi di DPRD atau 15% suara hasil Pemilu sebelumnya, maka dalam aturan baru yang tertuang dalam Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada, syarat minimal itu naik menjadi 20% kursi DPRD atau 25% suara.

Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20%% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 40 ayat 1 Perpu No. 1 Tahun 2014.

Dijelaskan lebih lanjut pada ayat 2, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20%, jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Kemudian dalam ayat 3 diatur mengenai, jika dalam hal Parpol atau gabungan Parpol mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan itu hanya berlaku untuk Parpol yang memperoleh kursi di DPRD.

Salah satu partai politik yang melakukan proses penjaringan calon kepala daerah adalah Partai Gerindra Kota Bengkulu. Penulis tertarik untuk mengetahui proses penjaringan yang dilakukan oleh Partai gerindra dikarenakan dalam pemilu sebelumnya merupakan peraih suara terbanyak ketiga dalam pemilu 2014. Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa Partai Gerindra sebagai partai baru juga sangat sukses di Kota Bengkulu dengan meraih suara terbanyak kedua dengan total suara sebanyak 22.394 suara dan perolehan kursi sebanyak 5 (lima) kursi.

Dalam pemilihan walikota dan wakil walikota di Kota Bengkulu, Partai Gerindra berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional dan partai Demokrat. Berdasarkan wawancara, alasan Partai Gerindra berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional adalah mengikuti koalisi partai politik di tingkat nasional. Seperti di ketahui bahwa di tingkat nasional, Partai Gerindra berkoalisi dengan Partai Amanan Nasional merupakan pasalgan koalisi yang sangat baik. Hal ini dikarenakan alasan berkoalisi di Kota Bengkulu juga dikarenakan pemilihan kepala daerah juga termasuk dalam skala kepentingan partai di tingkat nasional.<sup>6</sup>

Seperti yang telah diketahui, Partai Gerindra dan Partai Amanan Nasional telah berkoalisi sejak pemilihan persiden tahun 2014, saat itu bernama koalisi merah putih yang mengusung duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan sampai sekarang koalisi tersebut berjalan lancar. Atas dasar tersebut Partai gerindra dan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Bapak Jonaidi SP, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra, pada hari Kamis 21 Juni 2018, pukul 09.00 WIB.

Partai Amanan Nasional di tingkat daerah juga membentuk koalisi dalam pemilihan walikota di Kota Bengkulu.

Berdasarkan survei yang dilakukan partai Gerindra, warga Bengkulu telah merasakan langsung manfaat-manfaat pembangunan selama Helmi Hasan berkuasa dan memperoleh harapan akan peningkatan realisasi-realisisasi program yang telah dijalankan.

Pemilihan walikota dan wakil walikota di Kota Bengkulu tahun 2018, Partai Gerindra mengusung Dedy Wahyudi sebagai wakil walikota berpasangan dengan Helmi Hasan dari Partai Amanat Nasional. Dedy Wahyudi menerima rekomendasi bersama formulir B1KWK dari Partai Amanat Nasional dan akan diserahkan ke KPU sebagai syarat mendaftar. Dengan koalisi PAN dan Gerindra jumlah kursi di DPRD Kota sudah melebihi syarat yaitu 9 kursi.<sup>7</sup> Pemilihan Dedy Wahyudi merupakan hasil seleksi rekrutmen yang dilakukan oleh internal partai Gerindra.

Partai Gerindra dalam proses rekrutmen memang khusus menjanging calon walikota yang akan diusung, hal ini dikarenakan Partai Gerindra telah dipastikan berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional. Adapun Partai Amanat Nasional telah memiliki calon walikota yaitu Helmi Hasan yang merupakan walikota *incumbent* sekaligus Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Bengkulu, sehingga mencalonkan wakil walikota merupakan pilihan yang logis.

Selain alasan koalisi di tingkat nasional, Partai Gerindra juga menilai bahwa Helmi Hasan sebagai calon yang diusung oleh Partai Amanat Nasional adalah calon

---

<sup>7</sup> <http://rbtv.co.id/gerindra-usung-helmi-hasan-dedy-wahyudi/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, pukul 17.00 WIB.

*incumbent* yang telah teruji membangun infrastruktur Kota Bengkulu dengan memuaskan, memastikan tidak ada anak yang putus sekolah, memberikan modal usaha untuk pengangguran yang ingin bekerja, mendirikan rumah sakit untuk kesehatan warganya dan banyak terobosan-terobosan penting lain yang belum pernah ada sebelumnya.<sup>8</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam wawancara, bakal calon wali kota dan wakil walikota Bengkulu harus mempunyai modal dan hubungan yang baik dalam masyarakat. Hal ini karena berhubungan dengan besarnya popularitas dan nilai elektabilitas seseorang yang akan mencalonkan diri.<sup>9</sup> Partai politik menentukan seseorang layak dicalonkan atau tidak ditandai oleh tiga hal:<sup>10</sup>

- a. kesepakatan dari transaksi politik;
- b. kedua adalah kinerja dan program;
- c. popularitas dan elektabilitas dari survei.

Ketiga hal ini adalah hal yang paling dipertimbangkan oleh partai sampai memutuskan mengusungkan seseorang. Untuk bakal calon wali kota yang akan mencalonkan diri tetapi bukan merupakan anggota partai, prosesnya akan sedikit lebih rumit lagi. Partai Gerindra, satu dari beberapa partai yang membuka kesempatan untuk non-kader mengikuti penjarangan calon wali kota, memiliki beberapa tahap, antara lain adalah setelah pengembalian formulir, dilanjut dengan verifikasi data, faktual data, terus diadakan konvensi partai selama satu hari dan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Bapak Jonaidi SP, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra, pada hari Kamis 21 Juni 2018, pukul 09.00 WIB.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Bapak Jonaidi SP, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra, pada hari Kamis 21 Juni 2018, pukul 09.00 WIB.

<sup>10</sup> <http://jabar.tribunnews.com/2017/07/31/inilah-syarat-partai-dalam-mengusung-bakal-calon-wali-kota-bandung>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, pukul 17.00 WIB.

diakhiri dengan *fit and proper test*.<sup>11</sup> Hal itupun belum ditambahkan dengan survei elektabilitas dari masing-masing bakal calon wali kota yang juga menjadi pertimbangan partai.

Selain hal di atas, Faktor yang paling penting bagi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah adalah memilih calon yang benar-benar mampu menjadi pemimpin, dalam artian bisa memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada di masyarakat. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari rencana yang dicanangkan.

Untuk itu kandidat dan tim pemenangan harus pintar membaca peluang dan kondisi, termasuk mendekati tokoh-tokoh masyarakat untuk mencari simpatik pendukung. Hal ini dikarenakan selain *track record* yang dilihat, kandidat dan tim pemenangan harus pintar dalam menjaga komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Strategi rekrutmen di Partai Gerindra di Kota Bengkulu diatur sedemikian rupa bagi pemuda yang ada di kota Bengkulu untuk mendapatkan calon pemimpin atau regenerasi kepemimpinan yang dicita-citakan oleh Partai Gerindra yang sudah diatur dalam AD/ART. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber, diantaranya adalah Badan Pengurus Harian DPC Partai Gerindra yang meliputi Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang Kaderisasi dan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Jonaidi SP, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra, pada hari Kamis 21 Juni 2018, pukul 09.00 WIB.

Keanggotaan, Kader Muda, Pengurus Sayap Partai yang difokuskan untuk anak muda.

Strategi rekrutmen Partai Gerindra untuk mengikuti Pilkada tahun 2018 adalah sistem terbuka dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi.

Untuk persiapan pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilakukan tahun ini, DPD Gerindra Bengkulu dalam menentukan calon kepala daerah akan sesuai dengan keputusan dari DPP Partai, dimana Partai Gerindra membuka pendaftaran secara terbuka dan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan penjaringan, penyaringan verifikasi aktual, kemudian hasil dari seluruh rangkaian tersebut akan dikirim ke DPP partai untuk dimintakan rekomendasi. Hanya 1 (satu) pasang calon hasil rekomendasi DPP Partai yang akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Dalam proses rekrutmen calon wakil walikota, yang bertindak sebagai pelaksana rekrutmen adalah Partai Gerindra itu sendiri. konsep rekrutmen calon wakil walikota oleh Partai Gerindra Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan rekrutmen politik terhadap calon wakil walikota, merupakan tahapan awal yang dilakukan Partai Gerindra dalam pengrekrutan calon wakil keala daerah melalui:

- a. Mekanisme rekrutmen yang dilakukan Partai;
  - b. Waktu dan tempat pelaksanaan rekrutmen;
  - c. Sarana rekrutmen.
2. Kriteria rekrutmen politik pemimpin, syarat/ kriteria calon wakil walikota oleh Partai Gerindra antara lain yaitu :
- a. Usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup sebagaimana dalam aturan adalah 25 Tahun, tentu partai gerindra akan memilih yang umurnya lebih matang karena usia adalah hal yang penting karena dapat menentukan tingkat analisa seseorang dalam menghadapi masalah. Biasanya faktor usia juga dapat mengukur kematangan dan pengalaman seseorang dalam masyarakat.
  - b. Popularitas, yakni seseorang adalah orang yang dikenal masyarakat luas dan memiliki reputasi yang baik.
  - c. Pendidikan, yaitu seorang calon wakil walikota harus mempunyai tingkat pendidikan yang bagus minimal sarjana agar calon tersebut dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
  - d. Keuangan dan finansial, hal ini adalah suatu syarat yang juga dianggap penting, seorang calon wakil walikota haruslah mempunyai dana yang cukup besar yang digunakan ketika mengadakan kampanye.
  - e. Akseptabilitas, yakni penerimaan masyarakat terhadap seorang calon wakil walikota. Penerimaan ini akan muncul ketika masyarakat merasa calon tersebut adalah orang-orang yang benar-benar dapat menyuarakan kepentingannya.
  - f. Kapabilitas, yakni kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian merumuskan aspirasi tersebut terhadap bentuk pernyataan yang jelas dan menyampaikan hasil rumusan itu kepada masyarakat.
3. Kontrol rekrutmen politik, merupakan peran yang dilakukan Partai Gerindra dalam mengontrol jalannya rekrutmen. Adapun pelaksanaan kontrol rekrutmen politik dilakukan pada:
- a. Bakal calon Legislatif dari internal partai;
  - b. Bakal calon Legislatif dari eksternal partai.

Dari hasil rekrutmen terbuka yang dilakukan oleh Partai Gerindra, yang terpilih untuk mengikuti proses pemilihan walikota dan wakil walikota Kota

Bengkulu adalah Dedy Wahyudi yang merupakan kader dari Partai Gerindra. Dipilihnya Dedy Wahyudi menjadi wakil walikota dikarenakan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh partai.

Dari segi usia, Dedy Wahyudi dinilai sangat memenuhi syarat. Sebagai kader muda yang berusia 43 dinilai sangat matang, dan mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Sedangkan dari segi popularitas, Dedy Wahyudi sangat populer, hal ini dapat dilihat dari organisasi yang telah diikuti dan juga masih menjadi pengurus organisasi sampai saat ini. Adapun organisasi yang diikuti adalah:<sup>12</sup>

- a. 1996-1998- Ketuas SMPT Unib;
- b. 1996-1997-Ketua PTKP HMI Komisariat FE Unib;
- c. 1996-1998- Wk. Ketua Karang Taruna Camar Bahari;
- d. 1996-1999- Pengurus Pusat ISMEI (Ikatan Senat MahasiswaIndonesia);
- e. 1997-1998-Wakil Ketua IPKDMI;
- f. 1999-2007-Ketua Devisi Ekonomi Kerakyatan LKPERA;
- g. 1999-2006- Sekretaris DPD KNPI Prov. Bengkulu;
- h. 2006 2009-Wakil Ketua PWI Cabang Bengkulu;
- i. 2007-2011-Wakil Ketua PWM Cabang Bengkulu;
- j. 2011-2016-Wakil Ketua Pengcab PSSI Bengkulu;
- k. 2008-2013- Dewan Penasehat BSA (Bengkulu Surfing Association);
- l. 2013-sekarang- Dewan Pembina Msc (Marlborough Shooting Club);
- m. 2014 sekarang- Wakil Ketua IKA Cendana (SMPP, SMAN4, SMANS);
- n. 2017-sekarang- Sekretariat Umum IKBKM;
- o. 2015-sekarang, Ketua Bidang Ekonomi MES (Masyarakat Ekonomi Syariah);
- p. 2014-sekarang Ketua Bidang Humas ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia);

---

<sup>12</sup> <http://butinaranews.com/2018/05/07/ini-loh-dedy-wahyudi-wakil-walikota-2018-2023-insha-allah/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, pukul 17.00 WIB.

- q. 2015-sekarang Komite Eksekutif Asprov PSSI Bengkulu;
- r. 2017-sekarang TRAINING DAN NARASUMBER LKI HMI Cabang Bengkulu;
- s. 1995 LKII Cabang Bengkulu;
- t. 1997 Kongres ISMEI Unibraw Malang;
- u. 1997 Rekamas ISMEI di Udaya Bali 1998.

Untuk pendidikan, Dedy Wahyudi merupakan lulusan Magister Manajemen FEB UNIBA (*cum laude*) dan sekarang sebagai kandidat doktor dari UNIBA (tahun 2015-sekarang). Sedangkan untuk keuangan dan finansial, apabila dilihat dari riwayat pekerjaan dianggap cukup siap untuk bersaing di pemilihan walikota dan wakil walikota Bengkulu.

Partai Gerindra juga menilai Dedy Wahyudi memiliki akseptabilitas dan kapabilitas untuk menjadi seorang pemimpin, dalam wawancara, Bapak Jonaidi menyampaikan bahwa prestasi Dedy Wahyudi juga tidak sedikit. Dedy pernah membawa Rakyat Bengkulu Televisi (RBTv) meraih Juara Pertama Perusahaan TV terbaik Jawapos Grup se Indonesia. Dedy juga penggagas Hari Kain Batik Besurek yang seketika mampu menggeliatkan usaha penjualan batik di Bengkulu dengan spektakuler serta program Bengkulu Bersih, Indah, Sejuk dan Aman (BISA) yang menggeliatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bila dilacak semakin ke belakang, keterlibatan Dedy dalam kehidupan sosial dan politik bahkan telah ia mulai sejak di dunia kampus. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu (UNIB). Dengan posisinya ini, Dedy menjadi salah satu motor penggerak Gerakan Reformasi 1998 di Provinsi Bengkulu.

Dedy juga aktif di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), dan berbagai organisasi lainnya. Di bidang seni, Dedy berhasil menciptakan lagu Bengkulu BISA. Dedy dekat dengan semua kalangan, baik di kalangan anak muda, maupun dengan para tokoh/sesepuh Bengkulu.

Dari berbagai kriteria dan prestasi yang dimiliki tersebut, ditambah lagi dengan hasil *fit and proper test*, maka berdasarkan usulan dari DPC Partai Gerindra, DPP partai Gerindra sepakat untuk memberikan rekomendasi kepada Dedy Wahyudi sebagai calon wakil walikota yang akan diusung dalam pemilihan walikota dan wakil walikota di Kota Bengkulu dan berpasangan dengan Helmi Hasan sebagai calon Walikota dari Partai Amanat nasional.

Selanjutnya, penulis akan membahas mengenai alasan Partai Gerindra memilih Helmi Hasan sebagai calon walikota dari Partai Amanat Nasional untuk di pasangkan dengan Dedy Wahyudi sebagai calon wakil walikota dari Partai gerindra.

Partai Gerindra sebagaimana telah disebutkna sebelumnya, memilih berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional salah satu alasannya karena Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional di tingkat nasional telah bersepakat untuk berkoalisi. Alasan lainnya adalah visi misi Partai Gerindra juga tidak jauh berbeda dengan Partai Amanat Nasional.

Koalisi yang terbentuk di tingkat nasional juga berdampak kepada koalisi di tingkat daerah untuk proses pemilukada di Kota Bengkulu. Untuk pemilihan

walikota dan wakil walikota di Kota Bengkulu, Partai Amanat Nasional Kota Bengkulu mengusung Helmi Hasan sebagai calon walikota.

Dipilihnya Helmi Hasan sebagai calon walikota menurut Partai Gerindra merupakan langkah yang tepat, karena Helmi Hasan merupakan walikota petahana yang memiliki *track record* bagus di Bengkulu dengan berbagai prestasi yang sangat dibanggakan. Meskipun pernah tersangkut permasalahan hukum.

Partai Gerindra juga tidak menampik terhadap persoalan hukum yang pernah dihadapi oleh Helmi Hasan. Helmi tersangkut kasus korupsi bansos sebesar Rp 11,4 miliar yang ditangani oleh Kejari Bengkulu. Selain Helmi Hasan, Wakil Wali Kota Bengkulu Patriana Sosialinda juga ditetapkan sebagai tersangka sejak bulan Maret 2015. Tak hanya itu, di kasus yang sama jaksa juga telah menetapkan tersangka lainnya yaitu mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi yang kini menjadi anggota DPD RI, Ketua DPRD Bengkulu 2009-2014 Sawaludin Simbolon, Wakil Ketua DPRD Irman Sawiran, anggota DPRD Shandi Bernando dan Direktur BUMD Ratu Agung Niaga Diansyah Putra.<sup>13</sup>

Ketujuh tersangka tersebut menyusul 8 tersangka lainnya yang akan segera menjalani sidang yaitu Sekda Yadi, Kabag Kesra Suryawan Halusi, mantan Kabag Kesra Almizan, Kepala DPPKA Syaferi Syarif, Kasi Bansos Satria Budi, Bendahara Bansos Nopriana, Aspri Wali Kota Andrianto Himawan dan Wisnu. Kedelapan tersangka telah ditahan oleh jaksa.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup><https://news.detik.com/berita/d-2920393/absen-5-kali-pemeriksaan-wali-kota-bengkulu-helmi-hasan-diburu-jaksa>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, pukul 23.00 WIB.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Helmi Hasan menjadi terang setelah Hakim tunggal, Merrywati yang memimpin jalannya sidang praperadilan Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, tersangka kasus korupsi Bansos 2012 dan 2013 memutuskan untuk membatalkan status tersangka yang disandang walikota.<sup>15</sup>

Pembatalan status hukum Helmi Hasan setelah hakim Merrywati mempertimbangkan keterangan Saksi ahli Elektison Somi di dalam sidang menyebutkan setelah dilakukan pendelegasian dari Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan kepada bawahannya, dalam hal ini Sekretaris daerah (Sekda) kota Yadi, selaku koordinator pengelola keuangan kota dan SKPD terkait, maka seluruh tanggung jawab menjadi beban penerima tugas.<sup>16</sup>

Saksi ahli lain, dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Herlambang memberi keterangan yang lebih menguatkan. Herlambang menyampaikan bahwa dalam tindak pidana korupsi bukti yang harus dimiliki penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka yakni perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara.<sup>17</sup>

Dibatalkannya status tersangka tersangka tersebut, menurut Partai Gerindra semakin membuat nama Helmi Hasan semakin bersih, dan membuktikan bahwa Helmi Hasan memang tidak bersalah dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat Kota Bengkulu. Meskipun pada awalnya nama Helmi Hasan sering disebut-sebut dan beredar luas sebagai tersangka, dengan dibatalkannya status

---

<sup>15</sup><https://regional.kompas.com/read/2015/09/09/22024861/Menang.Sidang.Praperadilan.Wali.Kota.Bengkulu.Batal.Jadi.Tersangka.Korupsi>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, pukul 23.00 WIB.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

tersebut, Partai gerindra menganggap hal tersebut bisa dijadikan sebagai promosi pribadi Helmi Hasan dan mendongkrak popularitas.

Partai Gerindra berdasarkan survei yang mereka lakukan menyampaikan bahwa kinerja Helmi Hasan selama lima tahun ini untuk membangun kota Bengkulu sudah terlaksana dengan baik. Adapun bukti nyata atas keberhasilan kepemimpinan Helmi Hasan yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Bengkulu adalah dicalonkan oleh DPP Partai Amanat Nasional untuk menjadi calon wakil Gubernur di Provinsi Lampung.

Helmi Hasan sendiri menolak terhadap pencalonan tersebut dikarenakan Helmi menganggap masih ada kewajiban yang belum selesai dan masih ingin membangun Kota Bengkulu, seperti pembangunan rumah sakit, taman-taman kota, jalan mulus yang over target dan lainnya yang dianggap belum sempurna selain itu menurut Helmi masih ada warga kota yang belum terdaftar sebagai penerima air bersih. Jiwa rendah hati dan bertanggung jawab inilah yang membuat Partai Gerindra yakin untuk mengusung Helmi Hasan sebagai calon Walikota.

Sosok Helmi Hasan sendiri sebagai pemimpin tidak perlu lagi diragukan, 5 tahun menjabat walikota Bengkulu telah berhasil dengan berbagai pembangunan dan program kerakyatan yang telah dilakukan, menurut Partai Gerindra telah menjadi alat kampanye sendiri bagi Helmi Hasan, selain itu pandangan Partai Gerindra terhadap Helmi Hasan sehingga mendukung untuk menjadi calon walikota adalah:

1. Merakyat, visioner dan religius

Bagi saya, Helmi Hasan adalah sosok yang merakyat. Dia bersedia turun masuk ke rumah-rumah rakyat yang terletak di gang-gang sempit untuk menjenguk warga yang sakit dan membawanya untuk berobat hingga

sembuh. Helmi juga merupakan sosok yang religius. Semangat religius adalah modal penting untuk membangun Kota Bengkulu yang bermartabat dengan nilai-nilai kejujuran dan welas asih serta sesuai dengan harapan rakyat.

## 2. Teruji dan berpengalaman

Helmi merupakan sosok yang teruji dan berpengalaman dalam membangun Kota Bengkulu. Di tangan Helmi Hasan, sudah begitu banyak perubahan nyata yang terjadi di Kota Bengkulu seperti berdirinya rumah sakit, jalan-jalan mulus, trotoar menjadi bagus-bagus, kredit lunak Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake), dan banyak lainnya.

## 3. Memiliki program yang terukur, jelas dan lengkap

Sebagai petahana, program-program yang telah ada dan berjalan di Kota Bengkulu saat ini sangat pro rakyat dan memuaskan masyarakat, sehingga layak bagi Helmi Hasan untuk melanjutkan program-program yang telah ada ataupun melaksanakan program yang belum sempat direalisasikan, karena 5 tahun memang bukan waktu yang panjang untuk melaksanakan semua program seperti BPRS yang hingga saat ini belum ada izinnya. Pembangunan rumah sakit juga belum tuntas. Begitu juga dengan jalan mulus yang masih perlu dilanjutkan.

Pemerintah Kota Bengkulu pada masa kepemimpinan Helmi Hasan juga

banyak mengukir prestasi, antara lain:<sup>18</sup>

### 1. Penghargaan Indonesia Attractiveness Award

Terpilihnya Kota Bengkulu sebagai pemenang Indonesia Attractiveness Award 2017 menunjukkan adanya potensi besar Kota Bengkulu dalam menarik minat para investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor untuk turut memajukan perekonomian daerah. Penghargaan ini diselenggarakan oleh penerbit Majalah Tempo, Koran Tempo, Tempo English, Majalah Travelounge dan Portal News Tempo.co yang ketiga kalinya bekerjasama dengan Frontier Consulting Group. Riset ini melibatkan investor dan publik untuk memperoleh data mengenai daya tarik di sektor Investasi, Infrastruktur, Layanan Publik dan Pariwisata untuk tingkat Provinsi hingga kabupaten dan kota.

### 2. Penghargaan Peduli HAM

Kota Bengkulu menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI sebagai Kota Peduli HAM tahun 2017. Penghargaan ini diberikan pemerintah pusat kepada kota dan kabupaten di Indonesia yang dinilai memiliki

---

<sup>18</sup><http://pedomanbengkulu.com/2017/12/ini-prestasi-pemerintah-kota-bengkulu-sepanjang-tahun-2017/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, pukul 23.00 WIB.

kriteria sesuai Perkum HAM No 11 tahun 2013 antara lain hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman dan hak atas perempuan

### 3. Penghargaan KIN ASEAN

Pemerintah Kota Bengkulu menerima penghargaan program inovasi daerah kategori kesehatan yang digagas oleh Helmi Hasan yakni program Jemput Sakit Pulang Sehat (JSPS). Program JSPS yang digagas oleh Helmi Hasan ini merupakan program non APBD yang sering mendapatkan penghargaan. Program ini mendorong partisipasi aktif warga masyarakat untuk menolong sesama yang digerakkan mulai dari Walikota, struktur pemerintahan tertinggi di Kota Bengkulu, hingga ke struktur terendah seperti Ketua RT/RW.

### 4. Penghargaan Predikat Kepatuhan Pelayan Publik

Walikota Helmi Hasan menerima Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi dalam Pelayanan Publik Kategori kota yang diselenggarakan oleh Komisioner Ombudsman RI. Standar pelayanan masyarakat ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dimana Pemkot Bengkulu untuk Tahun 2017 mendapatkan penghargaan predikat kepatuhan tinggi (zona hijau). Dan kenaikan nilai dicapai oleh Pemkot Bengkulu dengan peningkatan terbaik pada kategori kota se-Indonesia. Survei kepatuhan untuk Provinsi Bengkulu telah dilakukan sejak tahun 2015. Pada tahun itu, semua pemerintah kabupaten, kota, termasuk Pemprov Bengkulu masuk dalam zona merah. Kota Bengkulu dinilai melakukan lompatan besar ketika pada tahun 2017 masuk ke Zona Hijau.

### 5. Penghargaan Adipura

Tahun ini juga Kota Bengkulu berhasil meraih Penghargaan Adipura atas kinerja Pemerintah Kota dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kota Bengkulu merupakan satu-satunya penerima penghargaan Adipura ini. Hal ini dikarenakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian LHK lebih ketat dari berbagai aspek, dan Kota Bengkulu berhasil memenuhi penilaian dari Kementerian LHK tersebut. Penghargaan Adipura yang diterima Kota Bengkulu merupakan bentuk penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) atas upaya-upaya perbaikan secara fisik terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bengkulu. Misalnya, jalan mulus dan trotoar, jalan dalam kota mulai terlihat rapi dan apik, pasar PTM dan Panorama yang terus dibenahi, hutan kota dan taman-taman semakin asri dan bersih, serta pengelolaan sampah di TPA Air Sebakul yang semakin baik.

### 6. Penghargaan Wahana Tata Nugraha 2016 Kategori Lalu Lintas

Penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan, dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya. Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah kegiatan pemberian penghargaan atas kemampuan daerah dan peran serta masyarakatnya dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kinerja operasional sistem transportasi perkotaan, sehingga tercipta sistem lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, selamat, aman, efisien, berkelanjutan dan menjamin ekuitas hak pengguna jalan.

Sosok Helmi Hasan sebagai pribadi yang islami, pemimpin yang pro rakyat serta prestasi yang telah diperoleh selama menjadi walikota di atas merupakan alasan dari Partai Gerindra untuk mendukung Helmi Hasan sebagai calon Walikota Bengkulu yang kemudian dipasangkan dengan Dedy Wahyudi, kader dari Partai Gerindra yang merupakan sosok pemuda visioner akan menjadi pasangan yang kuat dan cocok untuk memimpin Kota Bengkulu.

Dipilihnya Dedy Wahyudi sebagai pasangan dari Helmi Hasan, Partai Gerindra optimis kombinasi Helmi Hasan dan Dedy Wahyudi juga merupakan kombinasi ideal. Selama ini, program kerakyatan Helmi banyak terganjal karena hambatan politik di legislatif dan rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan. Sebagai mediator ulung, kedua hambatan itu pasti akan mampu disingkirkan oleh Dedy Wahyudi dengan pengalaman jurnalistiknya.<sup>19</sup>

Partai Gerindra yakin dengan diusungnya Helmi Hasan dan Dedy Wahyudi sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota dapat mewujudkan esensi dari diadakannya pemilu secara langsung yaitu kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Jonaidi SP, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra, pada hari Kamis 21 Juni 2018, pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan penjabaran di atas, pelaksanaan rekrutmen calon walikota dan wakil walikota dalam pemilihan walikota Bengkulu tahun 2018 oleh partai gerindra dilakukan dengan sistem terbuka dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Adapun kriteria yang digunakan oleh Partai gerindra adalah usia, popularitas, pendidikan, keuangan dan finansial, akseptabilitas, kapabilitas. Dengan kriteria tersebut kandidat yang terpilih adalah Dedi Wahyudi yang diusung oleh Partai Gerindra sebagai calon wakil walikota mendampingi Helmi Hasan sebagai calon walikota dari Partai Amanat nasional.

#### **B. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Yang Dihadapi Partai Gerindra Dalam Proses Rekrutmen Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu**

Partai Politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan dengan diarahkan pada dua hal utama, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat;
- b. Memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Salah satu fungsi dari partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, artinya adalah berfungsi untuk mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*), dengan demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik.<sup>21</sup>

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal:<sup>22</sup>

- a. Menyiapkan kader-kader pimpinan politik;
- b. Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta
- c. Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan jabatan politik yang bersifat strategis.

---

<sup>20</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

<sup>21</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550a445c6466c/fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, pukul 23.00 WIB.

<sup>22</sup> [https://bappenas.go.id/files/2513/4986/1926/bijah\\_\\_20091015142354\\_\\_2381\\_\\_0.pdf](https://bappenas.go.id/files/2513/4986/1926/bijah__20091015142354__2381__0.pdf), diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, pukul 23.00 WIB.

Makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif. Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara.<sup>23</sup>

Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itulah tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan cara berpikir, bertindak dan berperilaku setiap warga negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>24</sup>

Pada era reformasi seperti sekarang, peran partai politik masih sangat terbatas pada penempatan kader-kader politik pada jabatan-jabatan politik tertentu dan masih belum mencerminkan kesungguhannya dalam merekrut kader politik yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki loyalitas serta komitmen yang tinggi bagi perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat banyak.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Aktor utama sistem pemilihan kepala daerah adalah rakyat, parpol dan calon kepala daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan pemilihan kepala daerah.<sup>26</sup>

Sistem rekrutmen politik memiliki keragaman yang tiada batas. Salah satu metode tertua yang digunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin politik adalah dengan penyortiran atau penarikan undian yang digunakan pada zaman Yunani kuno. Yakni suatu metode yang dibuat untuk mencegah dominasi jabatan dari posisi yang berkuasa oleh kelompok individu tertentu dengan cara bergiliran atau rotasi.<sup>27</sup>

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen adalah persoalan disekitar politik, kekuasaan riil, dan berada disuatu historis. Persoalan disekitar politik berarti setiap calon-calon pemimpin yang akan dipilih harus mampu mengoptimisasikan segala tenaga dan upayanya untuk menyeimbangkan segala polemik-polemik yang sedang terjadi untuk dipersempit dampaknya sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat luas untuk memilihnya sebagai calon pemimpin kedepannya.<sup>28</sup>

Kekuasaan riil berarti seorang calon pemimpin harus memiliki teknik yang tersimpan didalam konsep pikirannya untuk dikembangkan ketika telah menjadi pemimpin. Konsep tersebut berisi suatu cara bagaimana mempengaruhi masyarakat

---

<sup>26</sup> <https://bukharawrite.wordpress.com/2014/04/02/rekrutmen-politik/>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2018, Pukul 16.00 WIB

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

luas sehingga mampu dipercaya untuk memimpin dalam periode yang lama dan abadi.

Berada dalam suatu historis artinya setiap pemimpin otomatis menginginkan nama dan jasa-jasanya selalu terekam dalam benak pikiran masyarakat dan setiap calon pemimpin harus mampu merangkai konsep tersebut sebelum dirinya terpilih menjadi pemimpin.<sup>29</sup>

Partai-partai yang mengadakan rekrutmen politik untuk menjaring calon kepala daerah harus memiliki daya tarik yang kuat sehingga akan banyak orang-orang yang mengikuti proses rekrutmen tersebut. Banyaknya peserta yang mengikuti proses rekrutmen akan membuat partai yang melakukan proses rekrutmen tersebut memiliki banyak pilihan yang dapat diajak bekerja sama agar menjadi pemenang pilkada.

Partai Gerindra adalah salah satu partai yang melakukan proses rekrutmen untuk mengikuti pilkada di Kota Bengkulu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Partai Gerindra membuka pendaftaran terbuka, artinya, tidak hanya kader partai saja yang berhak untuk mengikuti proses rekrutmen, tetapi masyarakat umum juga bisa berpartisipasi.

Partai Gerindra dalam mengadakan rekrutmen politik memiliki faktor pendukung yang sangat kuat. Adapun faktor pendukung Partai Gerindra dalam proses rekrutmen politik di Kota Bengkulu adalah sebagai partai baru yang sangat sukses di Kota Bengkulu dengan meraih suara terbanyak kedua dengan total suara

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

sebanyak 22.394 suara, sehingga akan banyak peminat yang akan mengikuti proses rekrutmen calon kepala daerah yang dibuka oleh Partai Gerindra.

Partai Gerindra sebagai peraih suara terbanyak kedua di Kota Bengkulu memiliki daya tarik tersendiri bagi setiap orang yang ingin menjadi kepala daerah. Hal ini dikarenakan para peserta rekrutmen yakin apabila mencalonkan diri melalui Partai Gerindra, maka peluang untuk menang menjadi kepala daerah akan sangat besar.

Proses penjaringan calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik terkadang memiliki hambatan atau kendala-kendala yang biasanya di hadapi. Meskipun mekanisme penjaringan dan syarat-syarat yang bisa ikut dalam proses penjaringan telah diatur sedemikian rupa.

Kendala yang biasanya terjadi adalah terbatasnya waktu yang dimiliki oleh partai politik di kantor cabang untuk melakukan penjaringan bakal calon, dimana banyaknya bakal calon yang mengajukan diri untuk ikut dalam proses penjaringan terkadang tidak sebanding dengan waktu yang dimiliki oleh partai politik sehingga tim penjaringan bakal calon sangat kesulitan untuk mengatur waktu yang ada. Karena hasil dari proses penjaringan di daerah masih harus diserahkan kepada DPP Partai untuk dilakukan rapat pleno sebelum diambil putusan akhir siapa yang berhak untuk dijadikan calon kepala daerah yang akan diusung oleh partai.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jonaidi, untuk menentukan calon kepala daerah yang akan di ajukan dalam pemilihan kepala daerah, Partai Partai Gerindra mengalami sedikit hambatan ataupun kendala. Adapun hambatan atau kendala yang dialami oleh Partai Gerindra adalah ada beberapa kandidat yang

sangat berpotensi mengundurkan diri karena alasan tidak mau berkoalisi, karena hanya akan menjadi calon walikota. Adanya kandidat berpotensi yang mengundurkan diri tersebut membuat Partai Gerindra kehilangan waktu percuma karena kandidat-kandidat tersebut telah mengikuti berberapa tahap rekrutmen.

Pengunduran diri tersebut membuat menurut Partai Gerindra membuat persaingan untuk menjadi calon walikota kurang memiliki daya saing, karena kandidat-kandidat yang semula memiliki kualitas yang merata menjadi sedikit timpang, sehingga Partai Gerindra harus lebih selektif untuk mencari kandidat yang mumpuni secara kualitas dan memang bersedia untuk menjadi calon walikota.

Selain hambatan internal dalam proses penjurangan, Partai Gerindra juga sedikit mengkhawatirkan permasalahan hukum yang pernah dihadapi oleh calon walikota dari partai koalisi yang pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bansos tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp 11,4 miliar oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu. Meskipun akhirnya diputus tidak bersalah melalui upaya hukum pra peradilan.

Hambatan lain adalah calon walikota dari partai koalisi sangat susah dihubungi dikarenakan urusan pribadi (keagamaan) sehingga Partai Gerindra sedikit mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan calon walikota. Sulitnya komunikasi dianggap Partai Gerindra menghambat komunikasi politik untuk menyatukan visi misi dan rencana pemenangan pasangan calon. Namun hal tersebut dapat ditangani karena komunikasi dengan Partai Amanat Nasional sebagai partai pengusung berjalan baik.

Berdasarkan penjabaran di atas, faktor pendukung Partai Gerindra dalam proses rekrutmen politik di Kota Bengkulu adalah sebagai partai baru yang sangat sukses di Kota Bengkulu dengan meraih suara terbanyak kedua dengan total suara sebanyak 22.394 suara, sehingga akan banyak peminat yang akan mengikuti proses rekrutmen calon kepala daerah yang dibuka oleh Partai Gerindra. Hal ini dikarenakan para peserta rekrutmen yakin apabila mencalonkan diri melalui Partai Gerindra, maka peluang untuk menang menjadi kepala daerah akan sangat besar. Sedangkan hambatan atau kendala yang dialami oleh Partai Gerindra adalah ada beberapa kandidat yang sangat berpotensi mengundurkan diri karena alasan tidak mau berkoalisi, karena hanya akan menjadi calon walikota. Pengunduran diri tersebut membuat menurut Partai Gerindra membuat persaingan untuk menjadi calon walikota kurang memiliki daya saing, karena kandidat-kandidat yang semula memiliki kualitas yang merata menjadi sedikit timpang, sehingga Partai Gerindra harus lebih selektif untuk mencari kandidat yang mumpuni secara kualitas dan memang bersedia untuk menjadi calon walikota.